

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KESESUAIAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH MENURUT PRINSIP
KETERBUKAAN**

SKRIPSI

Oleh
Diyah Anggun Kartika Sari
NIM. 05010420004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negeri
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Anggun Kartika Sari
NIM : 05010420004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kesesuaian
Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menurut
Prinsip Keterbukaan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2024
Saya yang menyatakan,



Diyah Anggun Kartika Sari
NIM. 05010420004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Diyah Anggun Kartika Sari

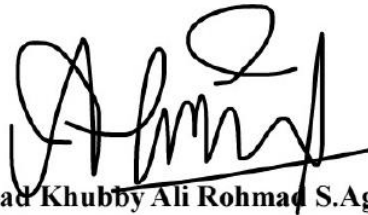
NIM : 05010420004

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kesesuaian Pengangkatan
Penjabat Kepala Daerah Menurut Prinsip Keterbukaan

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 4 November 2023

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad S.Ag, M.Si

NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

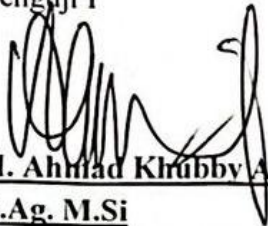
Nama : Diyah Anggun Kartika Sari

NIM. : 05010420004

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

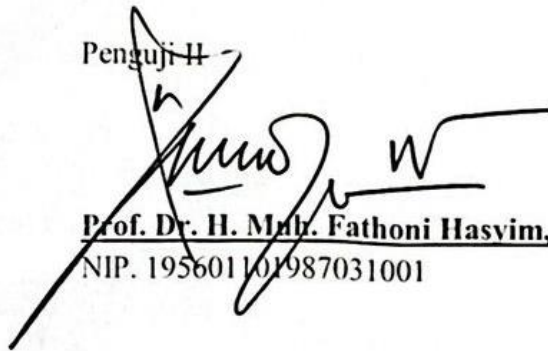
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



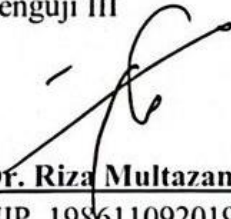
H. Ahmad Khubby Ali Rohmat,
S.Ag. M.Si
NIP. 197809202009111009

Penguji II



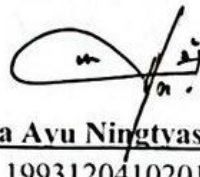
Prof. Dr. H. Mah. Fathoni Hasvim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312041020122017

Surabaya, 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIYAH ANGGUN KARTIKA SARI
NIM : 05010420004
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : 05010420004@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KESESUAIAN PENGANGKATAN
PETJABAT KEPALA DAERAH MENURUT PRINSIP KETERBUKAAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 OKTOBER 2021.

Penulis

(DIYAH ANGGUN K.S)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang disebabkan karena adanya pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024, Penjabat Kepala Daerah dipilih oleh Presiden dan Kementerian Dalam negeri yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat (9). Adanya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini menimbulkan beberapa polemik, diantaranya karena dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini tidak menggunakan mekanisme pemilihan secara demokratis, selain itu jangka waktu dari pemberhentian Kepala Daerah Definitif ke pelaksanaan Pilkada berjangka cukup lama yaitu 2-3 tahun. Sehingga menimbulkan persoalan terkait keterbukaan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kesesuaian pengangkatan kepala daerah dengan prinsip keterbukaan berdasarkan hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia dan berdasarkan *fiqh siyāsah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan jenis ini yang digunakan meliputi perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen dan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini berguna untuk mencari dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang telah dikumpulkan ini akan diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan teori hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: *pertama*, Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dengan pemilihan tidak secara langsung maka proses pemilihan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini dikira tidak terbuka, sehingga banyak masyarakat yang melakukan unjuk rasa supaya dibukakannya informasi mengenai calon yang akan diangkat sebagai Pj Kepala Daerah. *Kedua*, dari *fiqh siyāsah* sendiri, tidak memiliki mekanisme yang baku dalam pemilihan seorang pemimpin, tetapi disyaratkan agar memilih dengan cara musyawarah bersama demi kemaslahatan. Walaupun di dalam pengangkatan Pj Kepala Daerah ini sudah melibatkan DPRD selaku wakil rakyat namun peran DPRD di sini sebatas memilih tiga calon Pj saja, setelah itu semua proses pengangkatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga bisa dikatakan pengangkatan ini kurang adanya keterbukaan. Dalam hukum Islam pun masyarakat merupakan unsur yang penting dalam mengambil Keputusan untuk seorang pemimpin, sehingga dibutuhkan keterbukaan mengenai proses pengangkatan Pj Kepala Daerah ini untuk menghindari adanya kemunduran demokrasi dan ketidaknetralan para calon sebab akan diadakannya pemilu pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran supaya dalam pemilihan dan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini dilakukan secara terbuka dan transparan kepada DPRD dan Masyarakat. Melalui mekanisme yang tentunya telah diatur dengan matang. Mekanisme yang jelas dan terbuka bisa mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Serta bisa menumbuhkan kepercayaan Masyarakat kepada pemimpinnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN	
PRINSIP KETERBUKAAN	21
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāсах</i>	21
B. Konsep Kepemimpinan dalam <i>Fiqh Siyāсах</i>	25
C. Konsep Kepala Daerah dalam <i>Fiqh Siyāсах</i>	36
D. Prinsip Keterbukaan	41

BAB III PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DAN PENERAPANYA	41
A. Pengisian Jabatan Kepala Daerah	41
B. Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah	49
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN	66
A. Analisis Kesesuaian Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dengan Prinsip Keterbukaan.....	66
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Kesesuaian Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah	74
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
BIODATA PENULIS.....	101

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Al- Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar Al-Jayl, t.t.
- Al-Khalaf, Abd Wahab. *Al-Siyasah Wa Al-Syariah*. Kairo: Dar Ansor, 1977
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Zuhayli, Wahbah. "Ushul Al-Fikih AL-'Islami." *Damaskus* 1 (2001): 18.
- Arifin, Firdaus, dan Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Astuti, Widya. "Dinamika Politik Penjabat (PJ) Walikota Makassar Tahun 2020." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Group, 2018.
- Dwiyanto, Agus. *Mengapa Pelayanan Publik Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Fauzani, M Addi, dan Aprillia Wahyuningsih. *Problematik Penjabat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2021.
- Gusmansyah, Wery. *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualkan Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- MZ, Rahmat Hollyson, dan Sri Sundari. *PILKADA Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bestari, 2015.
- Nopyandri, SH., LL.M. "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif UUD 1945," 2011.
- Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah:Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2018.

- Situmorang, Jubair. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfaberta, 2014.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Al-Alukah, t.t.
- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Zein, Yahya Ahmad, Mawardi Khairi, dan Rinda Philona. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

b. Jurnal

- Abustan. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3, 2022.
- Asmui, Abdil Azizatul Furqon, A. Salman Manggalatung, Mara Sutan Rambe, Muh. Ikhsan, dan Ahmad Risyad Fadli. "Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3, 10 (2023).
- Deliamoor, Nandang Alamsah. "Problematisa Pelaksana Tuga (Plt) Dalam Ma Transisi Pemerintahan (Pra Dan Paca Pilkada Serentak)." *Cosmogov* 1, no. 2 (2017).
- Faisyah, Nur, Sudarsono, Shinta Hadiyantina, dan Irfan Amir. "Keabsahan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 1, 8 (2023).
- Falih, Muhammad Ariq Ilham. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Sebagai Pengganti Kepala Daerah Definitif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Universitas Sunan Ampel, 2023.
- Fachruroji, Muchamad. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisa Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 12, 4 (2008): 294.
- Handayani, Fitria Andalus, dan Mohamad Ichhsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 1, 11 (2019): 4.

- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 1, 3 (2018).
- Juanda dan Ogiandhafiz Juanda. "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Keamanan Nasional*, 1, 8 (2022).
- Kusuma, Mochamad Tommy. "Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Mawardi dan Abu Al-Hasan Ali Bin Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Bisri Al-Baghdadi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, t.t.
- Muhshi, Adam. "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance." *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018).
- Pasaribu, Ian. "Pilkada Serentak Dan Hukum Politik : Kontroversi Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Putusan Hukum Pilakda Kabupaten, Simalungun Sumatra Utara Tahun 2015." *Politika: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017).
- Purba, Nahot Martua, Philips A Kana, dan Pabuntian Sinaga. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Krisna Law*, 3, 1 (2019).
- Ramanda, Dio Ekie. "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3, 6 (2022).
- Ramdani, Dadan. "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Roy, Subir Kumar. "The Principle of Sustainable Development, Human Right, an Good Governance." *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016).
- Sitepu, Deddi. "Analisis Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Prinsip-Prinsip Demokrasi." Universitas Tanjungpura, 2016.
- Wasisto, Aryo. "Transparansi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 2023." *Info Singkat* 15, no. 15 (2023).
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019).

c. Blog

- Abustan. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3, 2022.
- Al Afghani, Mochamad Mardiansyah. "Mendagri Tegakan Penjabat Kepala Daerah diganti Karena Tidak Netral." *Antara* (blog), Desember 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3878685/mendagri-tegaskan-penjabat-kepala-daerah-diganti-karena-tidak-netral-di-pemilu-2024>.
- Al- Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar Al-Jayl, t.t.
- "Al-Baqarah Ayat 247," t.t. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>.
- Al-Khalaf, Abd Wahab. *Al-Siyasah Wa Al-Syariah*. Kairo: Dar Ansor, 1977.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Zuhayli, Wahbah. "Ushul Al-Fikih AL-'Islami." *Damaskus* 1 (2001): 18.
- "An-Nisa' Ayat 83," t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.
- Arifin, Firdaus, dan Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Asmui, Abdil Azizatul Furqon, A. Salman Manggalatung, Mara Sutan Rambe, Muh. Ikhsan, dan Ahmad Risyad Fadli. "Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3, 10 (2023).
- Astuti, Widya. "Dinamika Politik Penjabat (PJ) Walikota Makassar Tahun 2020." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Deliamoor, Nandang Alamsah. "Problematika Pelaksana Tuga (Plt) Dalam Ma Transisi Pemerintahan (Pra Dan Paca Pilkada Serentak)." *Cosmogov* 1, no. 2 (2017).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Group, 2018.
- Dwiyanto, Agus. *Mengapa Pelayanan Publik Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: UGM Press, 2005.

- Fachruroji, Muchamad. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisi Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 12, 4 (2008): 294.
- Faisyah, Nur, Sudarsono, Shinta Hadiyantina, dan Irfan Amir. "Keabsahan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 1, 8 (2023).
- Falih, Muhammad Ariq Ilham. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Sebagai Pengganti Kepala Daerah Definitif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Universitas Sunan Ampel, 2023.
- Fauzani, M Addi, dan Aprillia Wahyuningsih. *Problematic Penjabat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2021.
- Gusmansyah, Wery. *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Handayani, Fitria Andalus, dan Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 1, 11 (2019): 4.
- Harinugroho, Ardhito. "Siaran PERS: Putusan Gugatan PJ Kepala Daerah: PTUN Jakarta Ikut Serta Mengganggu Demokrasi." *LBH Jakarta* (blog), 2023. <https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-putusan-gugatan-pj-kepala-daerah-ptun-jakarta-ikut-serta-mengganggu-demokrasi/>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualkan Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 1, 3 (2018).
- Juanda dan Ogiandhafiz Juanda. "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Keamanan Nasional*, 1, 8 (2022).
- Kusuma, Mochamad Tommy. "Legitimasi Penjabta Kepala Daerah Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Marison, Walda. "Komnas HAM Ungkap Temuan Kepala Daerah Tidak Netral Selama Pemilu 2024." *Antara* (blog), 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/3976095/komnas-ham-ungkap-temuan-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024>.

- Mawardi dan Abu Al-Hasan Ali Bin Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Bisri Al-Baghdadi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, t.t.
- Muhshi, Adam. “Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018).
- MZ, Rahmat Hollyson, dan Sri Sundari. *PILKADA Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bestari, 2015.
- Nopyandri, SH., LL.M. “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif UUD 1945,” 2011.
- Nuonline. “An-Nisa ayat 58,” t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>.
- Nuonline. “Surat Ali Imran ayat 28,” t.t. <https://quran.nu.or.id/ali-imran>.
- Pasaribu, Ian. “Pilkada Serentak Dan Hukum Politik : Kontroversi Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Putusan Hukum Pilakda Kabupaten, Simalungun Sumatra Utara Tahun 2015.” *Politika: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017).
- Pratama, Yoshi Putra. “Kaidah memilih pemimpin menurut Dr. Raghieb Al-Sirjani.” *Wahdah.or.id* (blog), 2019. <https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/>.
- Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Purba, Nahot Martua, Philips A Kana, dan Pabuntian Sinaga. “Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.” *Jurnal Krisna Law*, 3, 1 (2019).
- Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (2022).
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ramanda, Dio Ekie. “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3, 6 (2022).
- Ramdani, Dadan. “Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.” Universitas Islam Indonesia, 2022.

- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Roy, Subir Kumar. "The Principle of Sustainable Development, Human Right, an Good Governance." *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016).
- Serayunusantara. "Mahasiswa Tulungagung Demo di DPRD, Desak Transparansi Pj Bupati," 2023. <https://serayunusantara.com/mahasiswa-tulungagung-demo-di-dprd-desak-tranparansi-pj-bupati/>.
- Sitepu, Deddi. "Analisis Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daeerah Sesuia Prinsip-Prinsip Demokrasi." Universitas Tanjungpura, 2016.
- Situmorang, Jubair. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam(Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soeprpto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sorik, Sultan. "Bagaimana Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebelum Pemilu 2024 Rawan Maladministrasi dan Mengancam Demokrasi," 2023, 2.
- "Surat Ali-Imran Ayat 28," 2024. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/28>.
- "Surat Al-Mai'dah Ayat 57," t.t. <https://quran.nu.or.id/al-maidah>.
- "Surat A-Nisa' Ayat 59," 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.
- "Surat An-Nahl Ayat 75," t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nahl>.
- "Surat An-Nisa Ayat 58," t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.
- "Surat At-Taubah Ayat 23," t.t. <https://quran.nu.or.id/at-taubah>.
- "Surat Shad Ayat 20," t.t. <https://quran.nu.or.id/shad>.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfaberta, 2014.
- Tafsirq. "Surat An-Nur Ayat 55," t.t. https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-55#google_vignette.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Al-Alukah, t.t.

- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Wasisto, Aryo. "Transparansi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 2023." *Info Singkat* 15, no. 15 (2023).
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019).
- Zein, Yahya Ahmad, Mawardi Khairi, dan Rinda Philona. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A